

LAPORAN EVALUASI INTERNAL



**DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN NGANJUK**

TAHUN ANGGARAN 2019

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Evaluasi Internal Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 dapat kami susun.

Penyusunan Laporan Evaluasi Internal Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 ini tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut melalui koordinasi dan asistensi dari berbagai nara sumber yang berkompeten. Mudah-mudahan Laporan Evaluasi Internal Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja Aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk pada Tahun berikutnya.

Nganjuk, Februari 2020

KEPALA DINAS SOSIAL, PPPA
KABUPATEN NGANJUK



NAFHAN TOHAWI, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP.19721208 199803 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

Evaluasi kegiatan merupakan salah satu dari proses manajemen untuk melihat tingkat keberhasilan dari suatu proses dan untuk menentukan langkah kedepan. Tentu evaluasi tersebut harus di dasarkan pada data/fakta yang ada, yang seharusnya data/fakta tersebut di desain sebagai bagian tidak terpisahkan dari suatu proses kegiatan.

Untuk mengevaluasi kegiatan atau memberi gambaran terhadap kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk bisa di lihat dari 2 (dua) urusan yaitu: Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Capaian urusan Sosial dapat diketahui dengan terpenuhinya indikator sasaran sebagai berikut :

1. Persentase jumlah PMKS/PPKS yang tertangani
2. Persentase jumlah PMKS/PPKS menurun
3. Persentase jumlah PSKS yang aktif

Capaian sasaran urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat diketahui dengan terpenuhinya indikator sasaran sebagai berikut :

1. Persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural meningkat
2. Persentase kasus tindak kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak yang difasilitasi penyelesaiannya
3. Meningkatnya persentase Kecamatan layak Anak.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka perlu adanya penentuan isu-isu strategis sebagai motivasi dalam memberikan pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk. Isu-isu strategis

Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023 yang harus ditangani secara berkesinambungan adalah:

1. Masih tingginya angka Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau Pemerlu Penanganan Kesejahteraan Sosial (PMKS/PPKS);
2. Masih kurangnya penanganan anak jalanan (Anjal), anak terlantar, anak putus sekolah dan anak korban narkoba;
3. Kurangnya partisipasi perempuan dalam pembangunan;
4. Lemahnya kelembagaan dan jaringan Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan Perlindungan Anak (PA);
5. Meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak;
6. Lemahnya kelembagaan dan jaringan perlindungan anak;
7. Tingginya pengaruh negatif media terhadap pembentukan kepribadian anak.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

2.1. Tujuan

Tujuan: tersajikan gambaran kegiatan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sosial; meningkatnya jumlah PSKS yang aktif dan peningkatan pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.

2.2. Ruang Lingkup

- a. Jenis data: data-data yang digunakan untuk menyusun evaluasi kegiatan ini adalah data-data kegiatan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk pada tahun 2019 sampai dengan Tribulan ke-4 meliputi :
 - Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - Laporan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan kabupaten Nganjuk ;
 - Laporan Keuangan Tahun 2019.
- b. Sumber data : data yang digunakan berasal dari laporan kegiatan dari masing-masing bidang.
- c. Periode data : data yang digunakan merupakan data yang dilaporkan selama satu tahun Anggaran 2019, dari masing-masing bidang di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk dan di Kompilasi di Sub Bagian Program dan Evaluasi.

BAB III
EVALUASI HASIL KEGIATAN

3.1. Laporan Capaian

Tabel 1. Capaian Kinerja

Capaian sasaran urusan sosial dapat diketahui dengan terpenuhinya indikator sasaran sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1 Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	1.1 Persentase jumlah PMKS/PPKS yang tertangani	88%	93,09%	105,78%
	1.2 Persentase jumlah PMKS/PPKS menurun	5,17%	5,97%	86,59%
2 Meningkatkan jumlah PSKS yang aktif	2.1 Persentase jumlah PSKS yang aktif	45 %	73,75%	163,88%
Jumlah rata-rata capaian kinerja				118,75%

Analisis terhadap pencapaian sasaran diatas akan kami uraikan lebih lanjut sebagai berikut :

1 Terwujudnya peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sosial

1.1 Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, maka dapat diukur dengan indikator nilai SKM baik.

Pada tahun 2019 nilai SKM yang dicapai oleh Dinas Sosial PPPA adalah 78,67 masuk dalam kategori BAIK. Hal ini dicapai dengan memberikan kuisisioner kepada masyarakat terkait pelayanan pembuatan pengantar KIS (Kartu Indonesia Sehat).

Nilai ini dihitung dengan rumus : Total nilai persepsi per unsur/Total unsur yang terisi x Nilai penimbang atau nilai indeks x nilai dasar

1.2 Indikator kedua adalah persentase jumlah PMKS/PPKS yang tertangani dapat dihitung dengan rumus :

(Jumlah PMKS yang tertangani tahun n / Jumlah PMKS tahun n) x 100%

Pada tahun 2019 ini realisasi persentase jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani adalah sebesar 93,09% (dari total jumlah PMKS/ PPKS yang tertangani sebesar 58.667 orang dari jumlah total jumlah PMKS/ PPKS 63.019 orang) sedangkan target yang ditetapkan dalam RENSTRA Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk adalah 88% sehingga capaian indikator kinerja pada tahun 2019 yaitu sebesar 105,78%.

1.3 Indikator ketiga adalah persentase jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial bisa dihitung dengan rumus :

(Jumlah PMKS tahun n / Jumlah penduduk tahun n) x 100%

Pada tahun 2019 ini realisasi persentase jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah sebesar 5,97% (dari total jumlah PMKS 63.019 orang dari total jumlah penduduk sebesar 1.054.611 orang) sedangkan target yang ditetapkan dalam RENSTRA Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk adalah 5,17% sehingga capaian indikator kinerja pada tahun 2019 yaitu sebesar 86,59%. Apabila kita bandingkan dengan capaian di tahun 2018 persentase PMKS 7,15% (74.937 orang penyandang PMKS dan jumlah penduduk 1.048.799 orang), maka terjadi penurunan persentase PMKS sebesar 1,18% yaitu dari 7,15% menjadi 5,97%.

2. Meningkatnya jumlah PSKS yang aktif

2.1 Indikator pertama adalah prosen jumlah PSKS yang aktif dapat dihitung dengan rumus :

(Jumlah PSKS tidak aktif tahun n / Jumlah PSKS aktif tahun n) x 100%

Pada tahun 2019 ini realisasi persentase jumlah PSKS yang aktif adalah sebesar 73,75% (dari total jumlah PMKS 63.019 orang dari total jumlah penduduk sebesar 1.054.611 orang) sedangkan target yang ditetapkan dalam RENSTRA Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk adalah 5,17% sehingga capaian indikator kinerja pada tahun 2019 yaitu sebesar 86,59%.

Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial dan terwujudnya penurunan jumlah PMKS/ PPKS, dialokasikan program/Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp **2.919.258.000** terealisasi sebesar Rp. **2.476.494.850** atau **84,20%**.

Capaian sasaran urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat diketahui dengan terpenuhinya indikator sasaran sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1 Meningkatkan pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	1.1 Persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural meningkat	25 %	33,68 %	134,72 %
	1.2 Persentase kasus tindak kekerasan dan traficking terhadap perempuan dan anak yang difasilitasi penyelesaiannya	100 %	100 %	100 %
	1.3 Meningkatnya persentase Kecamatan layak Anak	15 %	25 %	167 %
Jumlah rata-rata pencapaian kinerja				133,90%

Analisis terhadap pencapaian sasaran diatas akan kami uraikan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak

1.1 Indikator pertama persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural meningkat dapat dihitung dengan rumus :

$$(\sum \text{ASN Perempuan yang menduduki jabatan struktural} / \sum \text{Jabatan Struktural yang ada} \times 100\%)$$

Pada tahun 2019 ini realisasi persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural meningkat sebesar 33,68% (dari total jumlah ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural sebesar 286 orang dari jumlah total jabatan struktural yang ada

849 orang) sedangkan target yang ditetapkan dalam RENSTRA Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk adalah 25% sehingga capaian indikator kinerja pada tahun 2019 yaitu sebesar 134,72%.

1.2 Indikator kedua persentase kasus tindak kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak yang difasilitasi penyelesaiannya dapat dihitung dengan rumus :

(Jumlah kasus tindak kekerasan dan trafficking yang difasilitasi / jumlah kasus tindak kekerasan dan trafficking dilaporkan)

Pada tahun 2019 ini realisasi persentase kasus tindak kekerasan dan trafficking yang difasilitasi sebesar 100% (dari total jumlah kasus tindak kekerasan dan trafficking yang difasilitasi sebesar 85 orang dari jumlah total kasus tindak kekerasan dan trafficking dilaporkan 85 orang) sedangkan target yang ditetapkan dalam RENSTRA Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk adalah 100% sehingga capaian indikator kinerja pada tahun 2019 yaitu sebesar 100%.

1.3 Indikator ketiga meningkatnya persentase Kecamatan Layak Anak dapat dihitung dengan rumus :

(Jumlah Kecamatan yang Layak Anak / Jumlah Kecamatan se Kabupaten Nganjuk x 100%)

Pada tahun 2019 ini realisasi persentase Kecamatan Layak Anak sebesar 25% (dari total jumlah Kecamatan yang sudah Layak Anak sebanyak 5 Kecamatan dari jumlah total Kecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk sebanyak 20 Kecamatan) sedangkan target yang ditetapkan dalam RENSTRA Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk adalah 15% sehingga capaian indikator kinerja pada tahun 2019 yaitu sebesar 167%.

Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak tahun 2019 dialokasikan pada program dan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 1.342.604.000,- terealisasi Rp 1.138.539.650,- atau sebesar 84,76%.

Sebagai data pendukung adalah sebagaimana pada tabel dibawah ini :

No	Penyelesaian Kasus	
1	Jumlah Kasus	85
2	Jumlah Kasus yang diselesaikan	85
3	Jumlah kasus belum selesai/dalam proses	0
4	% capaian kinerja	100%

Upaya pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2019 dilaksanakan oleh Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk dengan program-program dan realisasi anggaran sebagai berikut :

3.2. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Tahun 2019

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Nganjuk

Kode Rekening	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Pagu Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	Belanja Tidak Langsung				
	Belanja Langsung				
1.06 . 1.06.01.01 . 01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	643.433.000,00	586.139.142,00	57.293.858,00	91,10
1.06 . 1.06.01.01 . 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.750.000,00	1.615.400,00	134.600,00	92,31
1.06 . 1.06.01.01 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	124.850.000,00	94.382.146,00	30.467.854,00	75,60
1.06 . 1.06.01.01 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	60.000.000,00	59.811.000,00	189.000,00	99,69
1.06 . 1.06.01.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	47.183.500,00	46.610.500,00	573.000,00	98,79

1.06 . 1.06.01.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.000.000,00	18.757.360,00	1.242.640,00	93,79
1.06 . 1.06.01.01 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	14.892.500,00	13.275.850,00	1.616.650,00	89,14
1.06 . 1.06.01.01 . 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	7.500.000,00	4.680.000,00	2.820.000,00	62,40
1.06 . 1.06.01.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	69.092.000,00	59.619.475,00	9.472.525,00	86,29
1.06 . 1.06.01.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	250.065.000,00	249.882.411,00	182.589,00	99,93
1.06 . 1.06.01.01 . 01.20	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	48.100.000,00	37.505.000,00	10.595.000,00	77,97
1.06 . 1.06.01.01 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	820.484.600,00	781.437.562,00	39.047.038,00	95,24
1.06 . 1.06.01.01 . 02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	55.634.600,00	54.410.000,00	1.224.600,00	97,80
1.06 . 1.06.01.01 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	55.000.000,00	54.468.000,00	532.000,00	99,03
1.06 . 1.06.01.01 . 02.10	Pengadaan mebeleur	41.500.000,00	40.880.000,00	620.000,00	98,51
1.06 . 1.06.01.01 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	120.000.000,00	115.470.500,00	4.529.500,00	96,23
1.06 . 1.06.01.01 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	213.650.000,00	188.402.662,00	25.247.338,00	88,18
1.06 . 1.06.01.01 . 02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	9.700.000,00	8.500.000,00	1.200.000,00	87,63
1.06 . 1.06.01.01 . 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	17.500.000,00	15.746.400,00	1.753.600,00	89,98
1.06 . 1.06.01.01 . 02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	12.500.000,00	11.190.000,00	1.310.000,00	89,52
1.06 . 1.06.01.01 . 02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	295.000.000,00	292.370.000,00	2.630.000,00	99,11

1.06 . 1.06.01.01 . 03	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8.800.000,00	8.200.000,00	600.000,00	93,18
1.06 . 1.06.01.01 . 03.08	Penyediaan biaya instruktur senam PNS	8.800.000,00	8.200.000,00	600.000,00	93,18
1.06 . 1.06.01.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15.000.000,00	14.557.000,00	443.000,00	97,05
1.06 . 1.06.01.01 . 06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.000.000,00	9.887.000,00	113.000,00	98,87
1.06 . 1.06.01.01 . 06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	2.500.000,00	2.286.000,00	214.000,00	91,44
1.06 . 1.06.01.01 . 06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	2.500.000,00	2.384.000,00	116.000,00	95,36
1.06 . 1.06.01.01 . 15	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.882.098.000,00	1.529.861.200,00	352.236.800,00	81,28
1.06 . 1.06.01.01 . 15.22	Biaya operasional bantuan sosial bagi lansia miskin	140.000.000,00	124.912.000,00	15.088.000,00	89,22
1.06 . 1.06.01.01 . 15.23	Pendampingan program keluarga harapan (PKH)	247.400.000,00	231.165.000,00	16.235.000,00	93,44
1.06 . 1.06.01.01 . 15.29	Evaluasi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Nganjuk	52.700.000,00	40.950.000,00	11.750.000,00	77,70
1.06 . 1.06.01.01 . 15.31	Penanganan eks psikotik dan penderita gangguan jiwa	65.000.000,00	60.458.400,00	4.541.600,00	93,01
1.06 . 1.06.01.01 . 15.32	Pelayanan psikososial bagi PMKS di Trauma Centre termasuk bagi korban bencana	155.070.000,00	120.695.800,00	34.374.200,00	77,83
1.06 . 1.06.01.01 . 15.33	BOP Tim Reaksi Cepat Perlindungan Sosial (TRC)	100.000.000,00	72.432.200,00	27.567.800,00	72,43
1.06 . 1.06.01.01 . 15.34	BOP Tim koordinasi fasilitasi, verifikasi, dan evaluasi Basis Data Terpadu (BDT)	366.950.000,00	214.098.500,00	152.851.500,00	58,35
1.06 . 1.06.01.01 . 15.90	BOP Bantuan khusus siswa miskin SMA/ SMK/ MA/ MAK	21.750.000,00	19.685.000,00	2.065.000,00	90,51

1.06 . 1.06.01.01 . 15.07	Peningkatan kualitas pelayanan saran dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi keluarga PMKS	409.328.000,00	347.706.500,00	61.621.500,00	84,95
1.06 . 1.06.01.01 . 15.13	Fasilitasi dan Pembinaan Lansia	65.000.000,00	48.360.800,00	16.639.200,00	74,40
1.06 . 1.06.01.01 . 15.16	Penanganan masalah sosial korban bencana	258.900.000,00	249.397.000,00	9.503.000,00	96,33
1.06 . 1.06.01.01 . 16	Program Pembinaan Anak Terlantar dan Anjal	84.000.000,00	77.472.100,00	6.527.900,00	92,23
1.06 . 1.06.01.01 . 16.02	Pelatihan Ketrampilan dan praktek belajar bagi anak terlantar	42.000.000,00	40.158.900,00	1.841.100,00	95,62
1.06 . 1.06.01.01 . 16.08	Pelatihan ketrampilan bagi anak jalanan	42.000.000,00	37.313.200,00	4.686.800,00	88,84
1.06 . 1.06.01.01 . 17	Program Pembinaan Para Penyandang cacat dan trauma	42.000.000,00	32.055.500,00	9.944.500,00	76,32
1.06 . 1.06.01.01 . 17.03	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan Eks trauma	42.000.000,00	32.055.500,00	9.944.500,00	76,32
1.06 . 1.06.01.01 . 19	Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo	85.000.000,00	66.189.750,00	18.810.250,00	92,23
1.06 . 1.06.01.01 . 19.08	Pembinaan dan fasilitasi orang dengan berkebutuhan khusus	35.000.000,00	28.638.000,00	6.362.000,00	81,82
1.06 . 1.06.01.01 . 19.09	Bimtek Pengelolaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	25.000.000,00	20.478.450,00	4.521.550,00	81,91
1.06 . 1.06.01.01 . 19.10	Bimtek Pengasuhan Anak Sesuai dengan Standart Nasional Pengasuhan Anak (SNPA)	25.000.000,00	17.073.300,00	7.926.700,00	68,29
1.06 . 1.06.01.01 . 20	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	826.160.000,00	770.916.300,00	55.243.700,00	93,31
1.06 . 1.06.01.01 . 20.02	Peningkatan jejaring kerja sama pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	75.800.000,00	48.429.000,00	27.371.000,00	63,89

1.06 . 1.06.01.01 . 20.03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	250.560.000,00	250.340.000,00	220.000,00	99,91
1.06 . 1.06.01.01 . 20.05	Pelestarian nilai-nilai keperintisan,kepahlawan an dan kejuangan	304.000.000,00	300.407.300,00	3.592.700,00	98,82
1.06 . 1.06.01.01 . 20.14	Peningkatan kualitas kelmebagaan kesejahteraan sosial	43.000.000,00	36.640.000,00	6.360.000,00	85,21
1.06 . 1.06.01.01 . 20.64	BOP Tim Koordinasi Bnatuan Pangan Non Tunai (BPNT)	152.800.000,00	135.100.000,00	17.700.000,00	88,42
1.06 . 1.06.01.01 . 15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	185.000.000,00	147.284.500,00	37.715.500,00	79,61
1.06 . 1.06.01.01 . 15.05	Roadshow perlindungan perempuan dan anak di lembaga pendidikan	95.000.000,00	86.759.000,00	8.241.000,00	91,33
1.06 . 1.06.01.01 . 15.10	Sosialisasi program pengembangan kabupaten layak anak bagi masyarakat	40.000.000,00	33.446.500,00	6.553.500,00	83,62
1.06 . 1.06.01.01 . 15.11	Monitoring dan evaluasi sekolah ramah anak dan puskesmas ramah anak	25.000.000,00	6.270.000,00	18.730.000,00	25,08
1.06 . 1.06.01.01 . 15.12	Fasilitasi tumbuh kembang anak	25.000.000,00	20.809.000,00	4.191.000,00	83,24
1.06 . 1.06.01.01 . 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	207.604.000,00	188.950.650,00	18.653.350,00	91,01
1.06 . 1.06.01.01 . 16.10	Pembinaan perlindungan anak dan kongres anak	126.604.000,00	114.100.200,00	12503800	90,12
1.06 . 1.06.01.01 . 16.11	Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	40.000.000,00	38.620.200,00	1379800	96,55
1.06 . 1.06.01.01 . 16.12	Komunikasi informais dan edukasi perlindungan perempuan dan anak	41.000.000,00	36.230.250,00	4769750	88,37
1.06 . 1.06.01.01 . 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan	435.000.000,00	352.985.600,00	82.014.400,00	81,15

	Perempuan				
1.06 . 1.06.01.01 . 17.05	Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	25.000.000,00	24.054.100,00	945.900,00	96,22
1.06 . 1.06.01.01 . 17.08	Fasilitasi perempuan korban KDRT dan perlindungan anak di Kabupaten Nganjuk	275.000.000,00	219.788.900,00	55.211.100,00	79,92
1.06 . 1.06.01.01 . 17.11	Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dna sejahtera (P2WKSS)	70.000.000,00	65.577.600,00	4.422.400,00	93,68
1.06 . 1.06.01.01 . 17.13	Pelatihan KHA bagi pendamping dan konseling korban KTPA	50.000.000,00	40.051.000,00	9.949.000,00	80,10
1.06 . 1.06.01.01 . 17.14	Optimalisasi pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak bagi petugas P2TP2A	15.000.000,00	3.514.000,00	11.486.000,00	23,43
1.06 . 1.06.01.01 . 18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	515.000.000,00	449.318.900,00	65.681.100,00	87,25
1.06 . 1.06.01.01 . 18.01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	120.000.000,00	96.508.000,00	23.492.000,00	80,42
1.06 . 1.06.01.01 . 18.07	Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	80.000.000,00	76.184.000,00	3.816.000,00	95,23
1.06 . 1.06.01.01 . 18.13	Pelatihan usaha ekonomi produktif bagi perempuan	20.000.000,00	13.853.400,00	6.146.600,00	69,27
1.06 . 1.06.01.01 . 18.14	Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dan perlindungan anak	230.000.000,00	212.169.900,00	17.830.100,00	92,25
1.06 . 1.06.01.01 . 18.15	Sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender bagi pengurus pondok pesantren	25.000.000,00	16.893.100,00	8.106.900,00	67,57
1.06 . 1.06.01.01 . 18.16	Kegiatan TOT pengarusutamaan gender	20.000.000,00	17.658.000,00	2.342.000,00	88,29
1.06 . 1.06.01.01 . 18.18	Sosialisasi peningkatan kemandirian remaja dan industri kreatif	20.000.000,00	16.052.500,00	3.947.500,00	80,26

Tabel diatas menunjukkan program dan kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk pada tahun 2019 dianggarkan sebesar **Rp. 5.749.579.600,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 5.005.368.204,-** dengan sisa sebesar **Rp. 744.211.396,-** atau **87,06%**. Sisa tersebut dikarenakan ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sebelum ada perubahan di PAK dan pengesahan PAK mendekati akhir tahun anggaran sehingga ada kegiatan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.

Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sosial dapat diukur dengan :

Menghitung jumlah PMKS yang tertangani dibagi jumlah seluruh PMKS dikali 100% dan menghitung jumlah PMKS dibagi jumlah penduduk dikali 100%.

Peningkatan jumlah PSKS yang aktif dapat diukur dengan menghitung jumlah PSKS yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh PSKS dikali 100%.

Peningkatan pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat diukur dengan :

1. Meningkatnya persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural;
2. Persentase kasus tindak kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak yang difasilitasi penyelesaiannya;
3. Persentase Kecamatan yang Layak Anak.

3.3. Notulen Hasil Rapat Staf Evaluasi Internal

NOTULEN

Acara : Rapat Staf Evaluasi Internal Pelaksanaan
Program / kegiatan TA.2019

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Maret 2020

Waktu Rapat : 07.30 WIB

Pimpinan rapat : Nafhan Tohawi, SH, MH.
Jabatan : Kepala Dinas Sosial PPPA
Peserta Rapat : ASN dan THL (Tenaga Harian Lepas) Dinas Sosial
PPPA

Hasil Rapat :

1. Realisasi belanja Dinsos PPPA pada tahun 2019 sebesar 87,06 %, namun masih ada beberapa kegiatan yang penyerapannya masih belum maksimal antara lain :
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan : 62,40%
 - BOP Tim Koordinasi, Fasilitasi, Verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu : 58,35%
 - Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku kesejahteraan sosial masy. : 63,89%
 - Monitoring dan Evaluasi Sekolah Ramah Anak dan PKM ramah anak : 25,08%
 - Optimalisasi Pelayanan terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak bagi petugas P2TP2A : 23,43%.

Dari pengalaman Tahun Anggaran 2019, maka mari kita usahakan di Tahun 2020 penyerapan anggaran OPD kita bisa lebih tinggi lagi.
2. Evaluasi nilai SAKIP : Nilai SAKIP kita baru B sama dengan nilai SAKIP Kab. Nganjuk, sedangkan Bp. Bupati menghendaki SAKIP Kab. Nganjuk Tahun 2019 minimal harus BB kalau bisa A. Karena target Kabupaten Nganjuk seperti itu berarti kita harus punya target minimal sama dengan Kabupaten yaitu minimal BB kalau bisa kita usahakan A. Untuk bisa memenuhi target tersebut maka kita harus bekerjasama dalam OPD kita dengan baik, membentuk Tim penyusun SAKIP yang solid dan saling bersinergi.
Tanpa adanya kerjasama yang baik diantara kita, maka target tersebut mustahil akan bisa kita capai.

BAB IV

PENUTUP

Dari evaluasi kegiatan sebagaimana tertuang dalam Bab III dapat disimpulkan bahwa target anggaran tahun 2019 sebesar **Rp.5.749.579.600,00** dan realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp.5.005.368.204,00** dengan capaian **87,06%**.

Semoga evaluasi kegiatan ini dapat bermanfaat bagi peningkatan hasil kinerja yang ada di dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk. Untuk mewujudkannya perlu dukungan dari semua pihak, terutama dari sumber data (satuan kerja terkait) berupa kecepatan dan ketepatan penyampaian data/laporan ke Sub Bagian Program dan Evaluasi.